

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS menyatakan bahwa dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk membiayai biaya non-personalia bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dibiayai untuk mendukung sejumlah kegiatan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS adalah sebuah program pembiayaan di bidang pendidikan untuk membiayai pelaksanaan program wajib belajar dalam mencapai kesetaraan pendidikan serta kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendidikan yang menerima dana BOS yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah luar biasa (SLB), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada dapodik;
2. Mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat 31 agustus tahun anggaran;
3. Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
4. Memiliki rekening atas nama satuan pendidikan; dan
5. Tidak termasuk dalam satuan pendidikan kerja sama.

### **2.1.1. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS:**

- a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dijalankan sesuai dengan kebutuhan Satuan pendidikan;
- b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan efek lanjutan, perkembangan dan daya guna dalam mewujudkan tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Efisien yaitu pengelolaan dana diharapkan dapat memajukan kualitas pembelajaran peserta didik dengan biaya yang minimal dan mendapatkan hasil yang maksimal;
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana yang dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dasar yang logis sesuai undang-undang yang berlaku; dan
- e. Transparansi yaitu pengelolaan dana dijalankan secara terbuka dan menerima segala aspirasi pemangku kepentingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

### **2.1.2. Indikator Pengelolaan Dana BOS**

- a. Tahapan perencanaan dan penganggaran

Dalam tahapan ini sekolah-sekolah membuat perencanaan dan penggaran dalam RKAS yang akan disusun untuk satu tahun penggunaan dana BOS sesuai dengan kepentingan sekolah. RKAS disusun berdasarkan evaluasi dari periode sebelumnya dan identifikasi keperluan dari pihak sekolah serta melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. RKAS setelah selesai disusun maka akan di input dalam aplikasi RKAS pendidikan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

b. Tahapan pelaksanaan penatausahaan

Penggunaan dana BOS digunakan sesuai dengan RKAS yang telah disusun, pelaksanaan penggunaan dana di catat secara lengkap dengan disertakan bukti dan dokumentasi mendukung serta dalam pembelanjaan barang dan jasa disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Setiap penggunaan dana dilakukan penginputan pada aplikasi RKAS.

c. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban dana BOS harus disesuaikan dengan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOS dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas pembelian pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaporan pertanggungjawaban satuan pendidikan bersedia untuk diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Laporan realisasi yang harus disampaikan oleh pihak sekolah diantaranya: laporan realisasi penggunaan dana BOS selama satu tahun anggaran, laporan sisa dana dan laporan penyesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pengukuran dari indikator pengelolaan dana BOS dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Dimana kuesioner berjumlah 2 pertanyaan terdiri dari tahapan perencanaan dan penganggaran 1 pertanyaan, pelaksanaan penatausahaan 2, serta pelaporan dan pertanggungjawaban 1 pertanyaan.

## **2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Suryani, Sugianingrat, & Laksemini (2020) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah unsur vital yang terdapat di dalam organisasi karena kinerja SDM menunjukkan terwujudnya visi dan misi dari sebuah organisasi. Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah aset yang sangat penting dalam pencapaian tujuan

organisasi. Sistem yang digunakan organisasi dalam mengelola SDM akan memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja organisasi sehingga diperlukannya organisasi yang memiliki SDM berkompetensi. Surajino, Nasruddin, & Paleni (2020) menyatakan bahwa SDM adalah sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, karya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa SDM adalah sumber daya yang mempunyai akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, dan karya dimiliki oleh organisasi sebagai unsur vital dan aset yang sangat penting dan dibutuhkan untuk dapat mewujudkan dan mencapai tujuan, visi dan misi dari sebuah organisasi dengan sistem pengelolaan SDM yang baik akan berdampak secara langsung terhadap kinerja organisasi. Anggota tim dana BOS adalah orang yang akan menjalankan pengelolaan dana BOS menyusun RKAS, pelaksanaan penatausahaan dan laporan LPJ.

Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa kompetensi merupakan alat utama bagi individu sebagai anggota dari sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sekaligus sebagai bagian dari perencanaan SDM atau kompetensi juga dapat diartikan sebagai sebuah standar yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh individu dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Kompetensi dimaksudkan sebagai sarana untuk mengidentifikasi kemampuan, sikap, dan sifat seorang karyawan yang akan dibutuhkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kompetensi juga dimaksudkan sebagai sarana dalam memfokuskan diri pada pengembangan pegawai sebagai salah satu cara mengatasi ketidaksimbangan antara kompetensi yang dibutuhkan sebagai standar kemampuan yang dimiliki karyawan. Konsep dari kompetensi yaitu keahlian, pengetahuan, pengalaman dan motivasi yang menuntut perilaku kearah pencapaian kinerja yang diharapkan. Signe, Lyle, Tucker, & Cofsky dalam Agung (2020) Menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang berhubungan dengan kinerja

terbaik dalam sebuah pekerjaan. Menurut Agung (2020) menyatakan bahwa kompetensi memiliki lima karakteristik yaitu motif, sifat bawaan, konsep diri, pengetahuan dan keahlian.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM adalah alat yang dimiliki oleh anggota tim BOS sebagai bagian dari tim BOS untuk dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dalam melakukan pengelolaan dana BOS, kompetensi yang dimiliki oleh tim BOS sebagai sarana dalam memfokuskan diri pada pengembangan untuk mengatasi ketidaksimbanagan antara kompetensi yang dibutuhkan sebagai standar kemampuan yang harus dimiliki oleh tim BOS.

Suryani, Sugianingrat, & Laksemini (2020) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan oleh karyawan sebagai prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya. kinerja yang baik dari karyawan akan memudahkan pimpinan organisasi mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, selain itu dengan adanya SDM yang berkompentensi dapat mewujudkan sebuah capaian kinerja organisasi yang baik.

Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa kompetensi organisasi adalah sebuah kompetensi yang terbangun dari individu yang memiliki kemampuan tertentu yang relevan atau berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi organisasi memiliki cakupan yang luas seperti: kinerja organisasi, kinerja tim, pengukuran kinerja, nilai-nilai pekerjaan, manajemen proyek, cara berpikir, manajemen pengetahuan dan sebagainya. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu sebagai bagian dari organisasi mempengaruhi kinerja dari pekerjaan yang telah dijalkannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu akan dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai karyawan di

dalam sebuah organisasi. Organisasi yang memiliki kinerja karyawan yang baik akan mampu mencapai visi, misi dan tujuannya sehingga organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi yang kompeten. Pengelolaan dana BOS memerlukan anggota tim BOS yang memiliki kinerja yang baik sehingga mampu menciptakan pencapaian tujuan masing-masing sekolah melalui RKAS yang telah disusun sehingga dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik serta tepat pada sasaran.

### **2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Mondy dan Neo dalam Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penggunaan jasa sumber daya manusia di dalam operasional organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia memiliki enam fungsi diantaranya:

1. Staffing, memastikan sumber daya yang dimiliki cukup secara jumlahnya dan memiliki skill sesuai dengan standar dari pekerjaannya;
2. Pengembangan SDM, melakukan peningkatan kualitas sumber daya dengan melakukan pelatihan serta evaluasi;
3. Fungsi penggajian, memberikan apresiasi atas jasa yang diberikan kepada organisasi;
4. Fungsi Kesehatan dan keselamatan, dengan memastikan karyawan bekerja dengan aman;
5. Hubungan antara karyawan; dan
6. Melakukan penelitian terhadap SDM, untuk mendukung organisasi dalam mengelola SDM.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan MSDM yaitu suatu kegiatan dari pengaturan dan penggunaan jasa SDM didalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan dana BOS memerlukan manajemen sumber daya manusia yang mampu

mengatur dan mengawasi SDM yang dimiliki oleh pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS seperti tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan anggota. MSDM membantu sekolah dalam mendapatkan SDM yang memiliki kemampuan atau skill yang sesuai dengan standar pekerjaan, kemudian membantu peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan, mengatur sistem penggajian SDM, memberikan rasa aman bagi pegawai, serta melakukan evaluasi terhadap pengembang dan penyesuaian dengan SDM yang dimiliki misalnya: adanya kekurangan dalam LPJ dana BOS berdasarkan hasil evaluasi maka akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dari tim BOS sehingga meningkatkan kualitas dari laporan yang dihasilkan.

### **2.2.2. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 mengungkapkan beberapa kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi Teknis adalah aparatur sipil negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknik jabatan.
- b. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk mengelola unit organisasi.
- c. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, dan prinsip, yang harus diperoleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

### 2.2.3. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Lyle, Signe, Tucker & Cofsky dalam (agung (2020) menyatakan kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja. Karakteristik terdiri dalam lima hal diantaranya:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi dan teori yang diperoleh seseorang dalam bidang tertentu.

2. Keahlian

Keahlian adalah kemampuan individu dalam mengerjakan bidang pekerjaannya.

3. Konsep diri

Konsep diri adalah keyakinan dan citra seseorang. Konsep diri dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, ajaran atau pendidikan, maupun informasi yang diterima.

4. Motivasi

Motivasi adalah segala sesuatu secara konsisten dipikirkan untuk terjadi, sebagai penggerak, pengendali, mengarahkan menuju sesuatu yang ingin dicapai.

5. Sifat Bawaan

Sifat Bawaan adalah gambaran mengenai karakteristik fisik atau non-fisik dari individu dalam respon suatu kejadian dalam hal mengontrol emosi, kecepatan, ketepatan dalam merespon masalah, dan memiliki empati lebih.

Pengukuran dari indikator kompetensi SDM dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Kharismayani & Kurniawan (2020) yang di modifikasi. Dimana kuesioner berjumlah 10 pertanyaan terdiri dari pengetahuan 3 pertanyaan, keahlian 2 pertanyaan, konsep diri 2 pertanyaan, sifat bawaan 2 pertanyaan, dan motivasi 1 pertanyaan.



### **2.3. Akuntabilitas**

Schahter dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup sebuah aktivitas yang hanya menjelaskan atas kegiatan yang telah dijalankan, namun pertanggungjawaban juga berkaitan dengan tindakan dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan kurang tepat. Hamid dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu memungkinkan individu dan organisasi untuk bertanggungjawab atas hasil yang diukur seobjektif mungkin.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban dari individu atau organisasi terhadap hasil dalam periode tertentu serta pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup aktivitas tetapi pada perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan kurang tepat. Pengelolaan dana BOS yang dijalankan dengan prinsip akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah sebagai pihak yang diberi tugas dan amanat dari pemerintah dan masyarakat memungkinkan diharapkan pihak sekolah mampu melakukan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, melakukan penyajian, pelaporan dan pengungkapan dengan adanya LPJ dana BOS yang diharapkan adanya pengungkapan secara transparansi dan kejelasan terhadap pengelolaan keuangan kepada pihak pemberi amanat serta pihak sekolah bertanggungjawab dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan yang kurang tepat.

#### **2.3.1. Akuntabilitas Sekolah**

Pengelolaan dana BOS dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS menyatakan bahwa Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Satuan pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui aplikasi realisasi kegiatan dan anggaran. Laporan realisasi keseluruhan pengguna dana dalam pasal 34 ayat (4) dan pasal 35 ayat (6) dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Nomor 2 Tahun 2022 meliputi :

1. Laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
2. Laporan sisa dana; dan
3. Laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa satuan pendidikan.

### **2.3.2. Akuntabilitas Publik**

Dubhasi dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ulum dalam Rakhmat (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Rakhmat (2018) akuntabilitas publik dalam pandangan luas melibatkan lembaga publik dan birokrasi untuk pengendalian yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Mardiasmo dalam Rakhmat (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah memberikan dan pengungkapan informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka disimpulkan akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan atau mengungkapkan informasi pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja dari pihak yang diberi amanah kepada pihak pemberi amanah atau pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut. Sekolah negeri adalah salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dalam pelayanan masyarakat sehingga

sekolah berkewajiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS kepada wali murid, pemerintah dan masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan, agar pihak yang memberi amanah dalam melakukan pengawasan mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Menurut Indradi dalam Raba (2020) menyatakan bahwa tanggungjawab masyarakat dalam melakukan pengawasan adalah wujud dari bentuk partisipasi masyarakat.

### **2.3.3. Jenis-jenis Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam :

1. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tim BOS SD Negeri Ongka Malino kepada dinas pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban dari tim BOS kepada masyarakat luas.

### **2.3.4. Dimensi Akuntabilitas Publik**

Elwood dalam Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum adalah penghindaran terjadinya kolusi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sebagai syarat dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses adalah pertanggungjawaban terkait prosedur yang digunakan dalam pengelolaan dana BOS dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah.

3. Akuntabilitas Program adalah pertimbangan penetapan tujuan dapat dicapai atau tidak serta mempertimbangkan alternatif yang dapat memberikan hasil yang maksimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan adalah akuntansi sektor publik menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien dalam menciptakan akuntabilitas publik.

### **2.3.5. Indikator-indikator Akuntabilitas**

David Hulme & Mark Turner dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep yang kompleks yang memiliki beberapa instrumen pengukuran atau indikator. Indikator-indikator akuntabilitas diantaranya:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan adalah organisasi sektor publik dalam membuat kebijakan harus konsisten dan yang menjalankan adalah orang yang benar-benar diberikan tanggung jawab.
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai adalah organisasi sektor publik harus memiliki konsep keadilan sosial, dan nilai-nilai professional.
- c. Melibatkan partisipasi publik adalah organisasi sektor publik memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam bentuk saran, pertemuan publik, dan kebebasan berpendapat.
- d. Keterbukaan atau transparansi adalah organisasi sektor publik memberikan layanan informasi terkait pengelolaan kepada masyarakat.
- e. Pemanfaatan sumber daya yang optimal adalah organisasi sektor publik mengikuti prosedur keuangan, melakukan pengawasan, penyelidikan dan perencanaan formal dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas organisasi.

Pengukuran dari indikator akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Haqiqi & Nugraha (2019) yang di modifikasi. Dimana kuesioner

berjumlah 10 pertanyaan terdiri dari legitimasi bagi para pembuat keputusan 2 pertanyaan, keberadaan kualitas moral yang memadai 2 pertanyaan, Melibatkan partisipasi publik 2 pertanyaan, keterbukaan dan transparansi 1 pertanyaan, dan pemanfaatan sumberdaya yang optimal 3 pertanyaan.

#### **2.4. Pengendalian Internal**

Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) menyatakan bahwa pengendalian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pengendalian membutuhkan dana dan bergantung pada orang yang melaksanakannya, sehingga pengendalian internal adalah sebuah tindakan atau aktivitas yang sangat bergantung pada pelaksanaannya dan penggunaannya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Bastian (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah proses pemutusan dari tujuan dan strategi organisasi serta proses menjaga berjalannya operasional organisasi secara efektif dan efisien. Hayes, Wallage, & Gortemaker (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses dalam pengendalian internal bukan sebuah peristiwa melakukan serangkaian kegiatan yang masuk ke dalam aktivitas-aktivitas entitas.

Berdasarkan pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah alat atau proses yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi organisasi serta menjaga berjalannya operasional organisasi secara efektif dan efisien dengan menjalankan pengendalian dalam serangkaian aktivitas-aktivitas entitas. Pengendalian internal sebagai alat pengendalian dalam proses pengelolaan dana BOS dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan selama penyusunan RKAS, dengan pengawasan pelaksanaan penatausahaan dijalankan sesuai dengan RKAS serta dalam pembuatan LPJ disesuaikan dengan RKAS yang telah dianggarkan. Pengendalian internal

akan melindungi pengelolaan dana BOS dari anggaran-anggaran yang tidak dianggarkan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan serta membantu pengawasan dalam menjalankan kewajiban yaitu sekolah wajib membayar pajak.

#### **2.4.1. Tujuan Pengendalian Internal**

Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki lima aspek kunci dalam pelaksanaannya diantaranya:

- a. Pencapaian tujuan strategis organisasi;
- b. Adanya keandalan dan interaksi atas laporan keuangan dan informasi operasional;
- c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan program;
- d. Pengamanan atas aset-aset organisasi; dan
- e. Kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

#### **2.4.2. Indikator Pengendalian Internal**

The committee of sponsoring organization (COSO) dalam Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) pengendalian internal adalah pengendalian secara menyeluruh yang mencakup semua aspek di dalam organisasi, dengan lima kerangka kerja yang diantaranya:

- a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah sebuah dasar atau fondasi dari organisasi yang berpengaruh sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian dengan kata lain lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan dibentuk didalam sebuah organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian yang mendukung dibentuk oleh seorang manajer atau pemimpin dan karyawan, namun untuk membangun lingkungan tersebut

diperlukan manajemen dan karyawan yang berkomitmen dan memiliki sikap positif serta bermanfaat terhadap pengendalian internal. Lima Kunci utama dalam menciptakan lingkungan pengendalian diantaranya:

1. Integritas dan etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. struktur organisasi
4. otorisasi dan akuntabilitas
5. kebijakan dan praktik yang baik pada sumber daya manusia.

b. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan manajemen telah melaksanakannya. Aktivitas pengawasan harus efektif dan efektif dalam menciptakan tujuan pengendalian.

Aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pemisahan jabatan / tugas / kewenangan yang cukup;
2. Otorisasi transaksi dan dari kegiatan yang disesuaikan dengan organisasi;
3. pendokumentasi dan pencatatan yang benar;
4. pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan;
5. evaluasi secara independen atas kinerja;
6. pengendalian terhadap pemrosesan informasi; dan
7. pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.

c. Pemantauan

Pemantauan yaitu melakukan penilaian kualitas kinerja sepanjang waktu dan menyakinkan temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya telah diselesaikan dengan benar. Pemantauan yang dilakukan diantaranya:

1. Mengevaluasi temuan dan peninjauan secara benar;

2. Menentukan tindakan yang benar dalam menanggapi temuan dan rekomendasi dari tinjauan yang ada; dan
3. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan berkaitan dengan tindakan yang akan digunakan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen.

Pengukuran dari indikator akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Kharismayani & Kurniawan (2020) yang di modifikasi. Dimana kuesioner berjumlah 10 pertanyaan terdiri dari lingkungan pengendalian 2 pertanyaan, aktivitas pengendalian 6 pertanyaan, dan pemantauan 2 pertanyaan.

## **2.5. Kerangka Konseptual**

### **2.5.1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah aset yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa kompetensi merupakan alat utama bagi individu sebagai anggota dari sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sekaligus sebagai bagian dari perencanaan SDM atau kompetensi juga dapat diartikan sebagai sebuah standar yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh individu dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Kompetensi dimaksudkan sebagai sarana untuk mengidentifikasi kemampuan, sikap, dan sifat seorang karyawan yang akan dibutuhkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah karakteristik individu yang membantunya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan kompetensi organisasi dengan hasil kerja yang berkualitas



yang diberikan oleh karyawan tersebut yang dilihat melalui kinerja karyawan dari tercapainya tujuan dan rencana organisasi, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menjalankan tugas yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Pengelolaan dana BOS memerlukan SDM yang berkompentensi yaitu dimana anggota tim BOS memiliki kemampuan, pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan standar pekerjaanya sehingga memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya dalam pengelolaan dana BOS yaitu mampu melakukan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut.

### **2.5.2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Schahter dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup sebuah aktivitas yang hanya menjelaskan atas kegiatan yang telah dijalankan, namun pertanggungjawaban juga berkaitan dengan tindakan dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan kurang tepat. Ulum dalam Rakhmat (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana BOS pihak sekolah

wajib menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, maka dari itu tim BOS diharapkan mampu bertanggungjawab untuk kegiatan operasional seobjektif mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekolah melalui tim BOS yang telah diberikan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana BOS wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk mengetahuinya yaitu pemerintah, wali murid dan masyarakat. Menjalankan prinsip akuntabilitas dengan melibatkan partisipasi publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

### **2.5.3. Hubungan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Bastian (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses pemutusan dari tujuan dan strategi organisasi serta proses menjaga berjalannya operasional organisasi secara efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti pengendalian internal mampu mengatur dan menjaga berjalannya sebuah RKAS yang telah disusun sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. tim BOS menjalankan pengendalian internal yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi kegiatan operasional sekolah yang andal, kegiatan operasional

sekolah dan program-program yang dijalankan akan berjalan dengan efektif dan efisien, aset-aset yang dimiliki sekolah dapat terjamin keamanannya, serta sekolah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga pembentukan tim BOS akan sesuai dengan petunjuk teknis dan sekolah akan tertib dalam membayar pajak.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul dan Variabel Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Fauzan (2014)	Pengaruh penerapan good Corporate Governance terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS.</li> <li>2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS</li> </ol>
Ayu, Ferdian, & Nelvia (2021).	Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Rimbo Ulu.	Metode penelitian menggunakan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS;</li> <li>2. Transparansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS; dan</li> <li>3. Akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.</li> </ol>

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Rakhmawati (2018)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan partisipasi stakeholder sebagai variabel moderasi	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;</li> <li>2. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;</li> <li>3. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;</li> <li>4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS; dan</li> <li>5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.</li> </ol>
-------------------	--	--	---

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Haqiqi & Nugraha (2019)	Analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulihsan	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS.</li> <li>2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS.</li> </ol>
Pura & Sufiati (2014)	Implikasi penerapan internal control terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	Internal Control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS
Agustin & Nuraini (2017)	Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana bantuan	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	Pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana BOS

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Ariastini, Yuniarta, & Kurniawan (2017).	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, proactive fraud audit, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS Kabupaten Klungkung	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana BOS;</li> <li>2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS;</li> <li>3. Proactive fraud audit berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS; dan</li> <li>4. Whistleblowing system berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS.</li> </ol>
--	--	--	---

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai petunjuk ilmiah diantaranya:

**a. Penelitian Fauzan (2014)**

Penelitian terdahulu dari Fauzan tahun 2014 dengan judul “Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah” Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS. Populasi yang digunakan SMP Negeri dan Swasta di kota Batu Malang dengan jumlah sampel 24 sekolah. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah; dan
2. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

**b. Penelitian Helfia Chintya Ayu, Tommy Ferdian, dan Risni Nelvia (2021)**

Penelitian terdahulu dari Ayu, Tommy, & Nelvia pada tahun 2021 dengan mengambil judul “Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada SMP negeri di Kecamatan Rimbo Ulu”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap efisiensi penyaluran dana BOS secara signifikan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SMP Negeri yang berada di Kecamatan Rimbo Ulu yang berjumlah lima sekolah dengan objek penelitian guru, karyawan tata usaha dan komite sekolah dengan total berjumlah 145 orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis statistik serta data penelitian menggunakan data primer. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS;
2. Transparansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS; dan
3. Akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.

**c. Penelitian Ita Rakhmawati (2018)**

Penelitian terdahulu dari Rakhmawati tahun 2018 dengan judul “pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan partisipasi stakeholder sebagai variabel moderasi” Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi stakeholder terhadap

efektivitas pengelolaan dana BOS. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah stakeholder eksternal yang terdiri dari komite sekolah dan orang tua siswa SMA Negeri di Kabupaten Kudus dengan jumlah 48 responden. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan model regresi moderasi menggunakan uji interaksi. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;
2. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;
3. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS;
4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS; dan
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

#### **d. Penelitian Fauzan Haqiqi dan Bayu Afriandi Rosa Nugraha (2019)**

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Haqiqi & Nugraha pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulihsan”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Pengaruh pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS. Populasi didalam penelitian ini wali murid SDN 11 Sendanu Darulihsan. Metode penelitian yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:



1. Transparansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS; dan
2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana BOS.

**e. Penelitian Rahman pura dan Sufiati (2014)**

Penelitian terdahulu dari pura & sufiati pada tahun 2014 yang berjudul “implikasi penerapan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan dana BOS”.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah *internal control* terhadap pengelolaan dana BOS. 13 sekolah SMP kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan jumlah 26 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *internal control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan *fraud* atas pengelolaan dana pada SMP/ sederajat kecamatan Tamalate Kota Makassar.

**f. Penelitian Silvani Agustin dan Azizah Nuraini (2017)**

Penelitian terdahulu dari Agustin & Nuraini pada tahun 2017, memiliki judul “Pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian terdahulu ini adalah pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana BOS. Populasi didalam penelitian yaitu dewan guru dan karyawan dari sekolah MTs Al-Khairiyah Cianjur yang berjumlah 35 orang. Metode penelitian yaitu kuantitatif deskriptif dengan hasil penelitian penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS.

**g. Penelitian Ni Kadek Dwi Ariastini, Gede Adi Yuniarta, dan Putu Sukma Kurniawan (2017)**

Penelitian terdahulu yang keempat dari Ariastini, Yuniarta & Kurniawan pada tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, *proactive fraud* audit, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan

*fraud* pada pengelolaan dana BOS Kabupaten Klungkung”. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, *Proactive fraud* dan *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah di Kabupaten Klungkung yang menerima dana BOS, yang berjumlah 53 sekolah. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana BOS;
2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS;
3. *Proactive fraud* audit berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS; dan
4. *Whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS.

## **2.7. Hipotesis**

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban Sementara dari rumusan masalah di dalam penelitian. Menurut Hartono (2017) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan yang akan diuji kebenarannya dengan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban sementara atau dugaan dari rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan pengujian kebenarannya dengan menggunakan fakta-fakta yang ada.

### 2.7.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah aset yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa kompetensi merupakan alat utama bagi individu sebagai anggota dari sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sistem yang digunakan organisasi dalam mengelola SDM akan memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja organisasi sehingga diperlukannya organisasi yang memiliki SDM berkompetensi.

Tim BOS sekolah yang memiliki kompetensi yang baik selama melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dana BOS akan mampu mengelolah keuangan dengan baik dan dapat menghasilkan sebuah laporan yang andal karena didukung dengan adanya pengetahuan, keahlian, konsep diri, motivasi dan sifat bawaan sehingga tujuan dari tercapainya RKAS dapat terlaksana dengan baik serta mengurangi terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses pengelolaan dana BOS. Selain dapat mencapai tujuan organisasi Tim BOS yang berkompetensi juga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ariastini, Yuniarta, & Kurniawan (2017) yang memiliki hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan teori yang ada, penjelasan mendukung, dan penelitian terdahulu Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1** : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

## **2.7.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan**

### **Operasional Sekolah**

Schacter dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup sebuah aktivitas yang hanya menjelaskan atas kegiatan yang telah dijalankan, namun pertanggungjawaban juga berkaitan dengan tindakan dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan kurang tepat. Ulum dalam Rakhmat (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berarti pihak sekolah mampu mempertanggungjawabkan pemakaian dana BOS sesuai dengan perencanaan dalam RKAS yang telah ditetapkan. Pihak sekolah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS baik kepada pemerintah, masyarakat, dan wali murid. Sekolah Negeri adalah salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dalam pelayanan masyarakat dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga sekolah berkewajiban untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Pengungkapan informasi kepada masyarakat agar mereka melakukan pengawasan mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Menurut Indradi dalam Raba (2020) menyatakan bahwa tanggungjawab masyarakat dalam melakukan pengawasan adalah wujud dari bentuk partisipasi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rakhmawati (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan (2014) yang memiliki hasil penelitian bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan teori yang ada, penjelasan mendukung, dan penelitian terdahulu Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2** : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

### **2.7.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) menyatakan bahwa pengendalian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, Pelaksanaan pengendalian membutuhkan dana dan bergantung pada orang yang melaksanakannya, sehingga pengendalian internal adalah sebuah tindakan atau aktivitas yang sangat bergantung pada pelaksanaannya dan penggunaannya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Pengendalian internal sebagai alat dalam melakukan kontrol dan pengawasan selama proses pengelolaan dana BOS dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan selama penyusunan RKAS sehingga dalam LPJ telah terealisasi rencana kegiatan yang dianggarkan sehingga menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) menyatakan bahwa tujuan dilakukannya pengendalian internal yaitu mencapai tujuan organisasi, memiliki keandalan dari laporan pertanggung jawaban yang dihasilkan kegiatan operasional berjalan dengan efektif, menjaga aset sekolah serta keputusan didalam organisasi dibentuk sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariastini, Agustin & Nuraini (2017) memiliki hasil bahwa Pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan dana BOS. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pura & Sufiati (2014) memiliki hasil Pengendalian *internal control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan dana BOS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3** : Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

